

# Keterlibatan Hukum dan Etika di Era Internet

Ammara Khairunisa Larasati<sup>1</sup>, Ayu Widyaningsih<sup>2</sup>, Canda Ayuning Aryanto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Faculty of Agriculture, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Corresponding author's email: [aammara@student.uns.ac.id](mailto:aammara@student.uns.ac.id), [widyayu1606@student.uns.ac.id](mailto:widyayu1606@student.uns.ac.id), [candaayr@student.uns.ac.id](mailto:candaayr@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak:** Dalam konteks pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, peran hukum dan etika di era internet semakin krusial. Kerja sama yang erat antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil menjadi landasan utama dalam menghadapi kompleksitas tantangan yang muncul. Pemerintah harus menjalankan peran strategis dalam merumuskan regulasi yang bertujuan melindungi kepentingan publik, sementara perusahaan teknologi diharapkan untuk bertanggung jawab dalam mengembangkan teknologi yang aman dan etis. Dalam hal ini, masyarakat sipil memegang peran penting sebagai pengawas independen yang dapat mengawasi implementasi regulasi dan mengidentifikasi pelanggaran etika. Kolaborasi yang kuat antara ketiga pihak ini menciptakan sebuah mekanisme penyesuaian yang cepat terhadap perkembangan teknologi, menjaga keseimbangan yang diperlukan antara inovasi teknologi dan nilai-nilai etika yang mendasar. Hasilnya, era internet dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas secara global, memberikan dampak positif yang lebih besar pada masyarakat, dan memastikan bahwa nilai-nilai etika tetap menjadi pedoman dalam perubahan yang terus-menerus.

**Kata Kunci:** Era Internet; Hukum dan Etika, Kerja Sama, Kolaborasi

---

## 1. Pendahuluan

Saat ini, kemajuan teknologi informasi terus berlangsung dengan cepat. Ini terlihat dari terus-menerusnya inovasi dalam pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak. Penggunaan media sosial, yang terhubung dengan internet, telah membawa sejumlah kemudahan yang signifikan. Media sosial ini memiliki kemampuan untuk melewati batasan dimensi kehidupan, ruang, dan waktu, sehingga memungkinkan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja untuk menggunakannya. Dengan kata lain, media sosial telah mengubah cara kita berinteraksi dan berkomunikasi secara mendasar (Parwitasari et al., 2022).

Dalam era internet, permasalahan seperti privasi data, keamanan cyber, kebebasan berbicara online, hak cipta, dan banyak lainnya menjadi sorotan utama. Untuk menghadapi kompleksitas ini, penting untuk mengembangkan hukum dan pedoman etika yang relevan dengan zaman digital. Ini melibatkan pertimbangan yang serius terhadap

kebutuhan privasi, kebebasan berbicara, perlindungan konsumen, dan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab.

Dengan perkembangan teknologi yang terus berubah, perdebatan mengenai peran hukum dan etika di internet menjadi semakin penting. Isu etika memunculkan pertanyaan tentang tanggung jawab individu dan perusahaan dalam penggunaan teknologi digital serta dampak sosial dan moral dari tindakan online. Dalam menghadapi isu-isu ini, perlu ada penyesuaian pada kerangka hukum yang sudah ada untuk mengatasi teknologi baru dan tantangan yang muncul. Dalam konteks ini, peran cyber security menjadi sangat penting. Fungsi utamanya adalah memastikan bahwa seluruh infrastruktur tetap beroperasi dengan lancar tanpa adanya gangguan. Serangan cyber dapat mengancam stabilitas suatu negara, namun dengan tata kelola cyber security yang efektif, risiko kejahatan di dunia maya dan nyata dapat dikurangi. Oleh karena itu, keterlibatan hukum dan etika di era internet akan dapat dihadapi dengan lebih efektif dan relevan. (Saputra & Wibawa, 2022)

Kerjasama yang erat antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil merupakan kunci penting dalam mengembangkan kerangka kerja yang efektif untuk menghadapi isu-isu yang dihadapi di era internet. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan regulasi yang bertujuan melindungi kepentingan publik, sementara perusahaan teknologi perlu bertanggung jawab dalam menerapkan teknologi yang tidak hanya aman, tetapi juga etis.

Masyarakat sipil memegang peran yang tak tergantikan sebagai pengawas independen, yang bertugas memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia dalam lingkungan digital yang terus berkembang. Dengan kerjasama ini, ketiga pihak dapat menggabungkan pengetahuan, sumber daya, dan perspektif yang berbeda untuk menciptakan kerangka kerja yang seimbang. Ini memungkinkan respons yang cepat terhadap perkembangan teknologi sambil menjaga keseimbangan antara inovasi digital dan prinsip-prinsip etika yang mendasar. Dengan demikian, keterlibatan hukum dan etika di era internet dapat dihadapi secara lebih efektif dan hasilnya adalah perkembangan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat global.

## 2. Hukum di Indonesia

Hukum di Indonesia merupakan fondasi regulasi yang penting dalam menghadapi perubahan masyarakat yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hukum harus memberi perlindungan kepada semua warga negara tanpa pandang bulu, tidak hanya terbatas pada sejumlah kelompok tertentu, dan jangan disalahgunakan (Ulum & Kusumo, 2023). Beberapa undang-undang dan regulasi yang relevan dalam konteks ini adalah:

### 1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang ini merupakan kerangka kerja hukum utama yang mengatur transaksi elektronik, keamanan cyber, dan penggunaan teknologi informasi di

Indonesia. UU ITE juga mencakup ketentuan tentang pelanggaran online dan sanksi hukum yang berlaku.

2) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Undang-Undang ini mengatur pengumpulan, pengolahan, dan perlindungan data pribadi. Hal ini penting dalam menjaga privasi individu dalam lingkungan digital yang semakin terhubung.

3) Undang-Undang Hak Cipta (UU Hak Cipta)

Undang-Undang ini melindungi hak cipta dan kekayaan intelektual dalam era internet yang memungkinkan penyebaran dan penggunaan konten digital dengan cepat.

4) Undang-Undang ITE juga mengatur isu-isu terkait dengan kebebasan berbicara online dan bagaimana batasan dapat diterapkan.

Penelitian lebih lanjut tentang bagaimana undang-undang dan regulasi tersebut diterapkan dalam konteks praktis dan dampaknya terhadap etika di era internet di Indonesia akan membantu memahami dinamika yang berkembang di lingkungan digital saat ini.

### 3. Peran Hukum dalam Menciptakan Ketertiban di Lingkungan Internet

Hukum adalah sistem aturan dan norma yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang dalam suatu negara atau wilayah untuk mengatur perilaku masyarakat. Tujuan utama hukum adalah untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat dengan menerapkan kepastian dan keadilan. Kepastian hukum melibatkan pembuatan aturan hukum yang jelas dan umum, yang juga harus ditegakkan secara tegas (Siregar, 2018). Untuk mencapai tujuan ini, hukum melibatkan beberapa poin penting:

1) Aturan dan Norma

Hukum terdiri dari berbagai aturan, norma, dan peraturan yang mengatur beragam aspek kehidupan, termasuk hukum pidana, hukum sipil, hukum kontrak, dan lain sebagainya.

2) Penegakan

Hukum memiliki sistem penegakan yang melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan untuk memastikan aturan diikuti dan pelanggaran ditindak.

3) Perlindungan Hak

Salah satu peran utama hukum adalah melindungi hak individu dan kelompok, termasuk hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan hak milik.

4) Penyelesaian Sengketa

Hukum menyediakan prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa, seperti peradilan, arbitrase, atau mediasi, untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang berkonflik.

5) Perubahan dan Evolusi

Hukum dapat berubah seiring waktu dan dapat diubah melalui proses legislatif atau keputusan pengadilan. Ini memungkinkan hukum untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik.

6) Sanksi

Hukum dapat mengatur sanksi atau hukuman bagi pelanggarnya. Ini termasuk denda, hukuman penjara, atau sanksi lainnya tergantung pada pelanggaran yang dilakukan.

7) Profesi Hukum

Praktisi hukum seperti pengacara, hakim, dan jaksa memiliki peran penting dalam sistem hukum untuk memberikan bantuan hukum, memutuskan kasus, dan menegakkan hukum.

Peran hukum menjadi landasan yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang teratur di lingkungan internet, karena hukum memastikan bahwa aturan, norma, dan regulasi yang sama berlaku dalam dunia maya seperti yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hak individu di era internet, serta menyediakan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan, mengatur sanksi terhadap pelanggaran, dan merespons perubahan teknologi.

#### **4. Peran Etika Internet dalam Menciptakan Lingkungan Internet yang Bertanggungjawab**

Etika atau moralitas mencakup semua norma, nilai, dan sikap moral individu atau masyarakat. Nilai-nilai moral tersebut terdapat dalam kerangka moralitas, yang mencakup keyakinan dan sikap internal, bukan hanya ketaatan terhadap peraturan yang diberlakukan dari luar individu (Sulasno & Agustin, 2018). Ini mencakup pertimbangan mengenai apa yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk, serta bagaimana kita seharusnya bersikap dan bertindak dalam berbagai situasi kehidupan.

Di era digital yang semakin berkembang, muncul konsep yang tak kalah penting, yaitu etika internet. Etika internet adalah seperangkat prinsip yang mengarahkan perilaku kita dalam dunia maya. Prinsip-prinsip ini mencakup respek terhadap sesama pengguna online, menjaga privasi pribadi, memastikan keamanan dalam dunia cyber, serta menekankan penyebaran informasi yang akurat dan benar. Etika internet merupakan landasan penting untuk menciptakan lingkungan online yang aman, bermartabat, dan terbebas dari ancaman seperti cyberbullying dan penyebaran berita palsu.

Selain itu, etika internet mendorong keterbukaan, transparansi, dan pengembangan perangkat lunak yang bertanggung jawab. Penggunaan teknologi yang bijak, kepatuhan terhadap kebijakan platform, dan prinsip-prinsip etika adalah kunci untuk menciptakan lingkungan online positif dan bertanggung jawab. Dengan memasukkan etika internet dalam aktivitas online kita, kita menjaga martabat dan integritas dalam dunia maya.

## 5. Implikasi Regulasi terhadap Etika Internet

Membangun etika dan regulasi media yang komprehensif dan berdimensi jangka panjang bukan perkara mudah. Sementara perkembangan teknologi komunikasi umumnya selalu mendahului regulasi. Regulasi selalu ketinggalan jika dihadapkan dengan perkembangan teknologi komunikasi yang demikian cepat. Sementara jika sebuah regulasi atau kebijakan disahkan dan diimplementasikan, bisa saja telah muncul teknologi baru yang tak terjangkau oleh regulasi tersebut. Regulasi di era internet memiliki dampak yang signifikan terhadap etika dalam dunia digital (Hadi, 2017). Beberapa aspek regulasi yang perlu diperhatikan terkait etika internet, yaitu:

### 1) Perlindungan Privasi

Regulasi privasi data, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa, mengharuskan perusahaan untuk melindungi data pribadi pengguna dengan ketat.

### 2) Kebijakan Anti-Cyberbullying

Regulasi semacam ini mempromosikan etika berkomunikasi secara online dan mengurangi risiko perilaku merugikan dalam lingkungan digital.

### 3) Penyebaran Berita Palsu (Hoaks)

Regulasi yang lebih ketat terhadap penyebaran berita palsu dan disinformasi dapat membantu memastikan penyebaran informasi yang benar.

### 4) Tanggung Jawab Platform Online

Regulasi dapat memaksa platform online untuk lebih bertanggung jawab dalam memoderasi konten yang diunggah oleh pengguna. Hal ini memainkan peran dalam mempromosikan etika dalam berbagi konten.

### 5) Kebebasan Berbicara

Regulasi yang berkaitan dengan kebebasan berbicara online harus diimplementasikan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa etika berbicara tidak terabaikan, sambil mempertahankan hak dasar untuk berekspresi.

Dengan demikian, pengembangan regulasi yang cermat dan sejalan dengan prinsip-prinsip etika internet menjadi penting dalam menjaga lingkungan online yang positif dan bertanggung jawab.

## 6. Mencapai Keselarasan Antara Hukum dan Etika di Era Internet

Sejalan dengan perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi di era internet, tantangan mengenai hukum dan etika semakin kompleks. Etika tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apa yang diperbolehkan atau dilarang bagi manusia. Hal ini dianggap sebagai tanggung jawab pihak-pihak yang memberikan pedoman moral. Ini merupakan keterbatasan etika dibandingkan dengan ajaran moral. Namun, etika dapat menjelaskan mengapa dan berdasarkan apa manusia harus mengikuti norma tertentu. Ini adalah keunggulan etika dibandingkan dengan ajaran moral (Windarto, 2020).

Pembahasan sepanjang jurnal ini telah menggambarkan betapa pentingnya keselarasan antara hukum dan etika dalam menjaga lingkungan digital yang positif dan bertanggung jawab. Bagaimana keselarasan ini dapat dicapai?

1) Pemahaman Mendalam

Pertama-tama, kita perlu memahami secara mendalam tantangan hukum dan etika yang muncul dalam era internet.

2) Kerja Sama Multistakeholder

Penting untuk memastikan kerja sama yang erat antara pemerintah, perusahaan teknologi, masyarakat sipil, dan akademisi.

3) Fleksibilitas dan Responsif

Hukum dan etika harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi. Regulasi harus dirancang dengan prinsip fleksibilitas untuk mengatasi tantangan yang muncul.

4) Pendidikan dan Kesadaran

Pendidikan tentang hukum dan etika internet perlu ditingkatkan, baik di tingkat sekolah maupun di dalam organisasi.

5) Keselarasan sebagai Tujuan

Akhirnya, kita harus menganggap keselarasan antara hukum dan etika sebagai tujuan utama dalam mengembangkan dan mengimplementasikan regulasi. Tujuan ini akan membantu memastikan bahwa era internet tetap menjadi sumber inovasi sekaligus tetap memegang nilai-nilai etika yang mendasar.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita dapat berusaha mencapai keselarasan yang diperlukan antara hukum dan etika dalam era internet yang terus berkembang.

## 7. Kesimpulan

Pentingnya keselarasan antara hukum dan etika dalam menghadapi perubahan pesat di era internet. Era digital yang terus berkembang membawa tantangan kompleks terkait dengan privasi data, keamanan cyber, kebebasan berbicara online, dan banyak aspek lainnya. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan regulasi yang bijak dan etika internet yang kuat.

Dalam konteks Indonesia, regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan Undang-Undang Hak Cipta telah menjadi landasan penting dalam mengatur perilaku di dunia maya. Namun, perlu pemahaman yang mendalam tentang implementasi regulasi ini dan dampaknya terhadap etika di era internet.

Kunci untuk mencapai keselarasan antara hukum dan etika adalah kerja sama multistakeholder antara pemerintah, perusahaan teknologi, masyarakat sipil, dan akademisi. Fleksibilitas dalam regulasi, pendidikan tentang hukum dan etika internet, serta kesadaran akan pentingnya keselarasan harus menjadi fokus kita.

Dengan tekad untuk menjaga nilai-nilai etika dalam lingkungan digital yang terus berkembang, kita dapat menciptakan era internet yang memberikan manfaat bagi masyarakat global sambil memastikan keadilan, privasi, dan martabat tetap terjaga. Keselarasan antara hukum dan etika adalah fondasi yang kuat untuk menghadapi masa depan digital yang cerah dan bertanggung jawab.

## Referensi

- Hadi, I. P. (2017). *Tantangan Etika dan Regulasi Media Digital*. Repository.Petra.Ac.Id.
- Parwitasari, T. A., Supanto, Ismunarno, Budyatmojo, W., & Sulistyanta. (2022). Kesadaran Hukum dan Etika dalam Menggunakan Media Sosial. *Jurnal Gema Keadilan*, 9(1), 2.
- Saputra, M. F., & Wibawa, A. P. (2022). Peran dan Tantangan Cyber Security di Era Society 5.0. *Jurnal Inovasi Teknik Dan Edukasi Teknologi*, 2(7).
- Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, 18(23).
- Sulasno, & Agustin, F. (2018). Etika dan Hukum dalam Penggunaan Hak Cipta di Media Sosial. *SPEKTRUM 2019: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 15(1).
- Ulum, B. B., & Kusumo, M. I. C. (2023). Mengembangkan Strategi yang Berkeadilan Meningkatkan Penegakan Hukum. *Indigenous Knowledge*, 2(1).
- Windarto, F. O. (2020). Kesadaran Hukum dalam Penggunaan Media Sosial Studi Kasus di SMA Negeri 2 Muara Bungo. *RIO Law Jurnal*, 1(2).